

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif oleh DPRD Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah mengikuti kerangka peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu penetapan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan tahap adopsi kebijakan. Meskipun tahapan-tahapan tersebut telah dilalui, pelaksanaannya masih menunjukkan kurang optimal. Dalam periode antara tahun 2014 hingga 2024, DPRD Kabupaten Kutai Barat berhasil menghasilkan 36 Raperda dan Perda Inisiatif. Namun, jumlah tersebut belum mencerminkan potensi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak inisiatif ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup beberapa aspek yang menjadi tantangan di dalam organisasi DPRD itu sendiri. Faktor internal meliputi; Sumber Daya Manusia, Aspek Faktor Sosial Ekonomi, Pola Pikir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengalaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Faktor Kapasitas Wakil Rakyat. Selanjutnya hambatan factor eksternal adalah: Komunikasi Politik antara DPRD dengan masyarakat, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Tenaga Ahli dan Tim Ahli DPRD, Faktor Anggaran, dan Dinamika politik di dalam DPRD.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sering kali tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan anggota dewan yang berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Aspek sosial ekonomi masyarakat di Kutai Barat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pola pikir anggota DPRD. Ketidapahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sering kali membuat anggota dewan kurang responsif terhadap kebutuhan konstituen mereka. Pengalaman anggota DPRD juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Anggota yang baru terpilih sering kali kurang memiliki pengalaman dalam mengelola dan merumuskan kebijakan, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan belajar. Selain itu, kapasitas wakil rakyat itu sendiri menjadi tantangan tersendiri. Tanpa dukungan yang memadai dari tim ahli atau staf pendukung, anggota DPRD mungkin kesulitan dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan hak inisiatif. Salah satu tantangan utama adalah komunikasi politik antara DPRD dengan masyarakat. Ketidakjelasan dalam menyampaikan informasi mengenai proses dan hasil kebijakan sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga menjadi masalah yang serius. Masyarakat yang tidak terlibat dalam proses ini cenderung merasa terasing dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan. Kompetensi tenaga ahli dan tim ahli DPRD juga menjadi perhatian. Jika tim ini

tidak memiliki kualifikasi yang memadai, maka kualitas kebijakan yang dihasilkan akan terpengaruh. Faktor anggaran pun tidak bisa diabaikan, karena keterbatasan dana sering kali membatasi ruang gerak DPRD dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Terakhir, dinamika politik di dalam DPRD yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Barat, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan anggota DPRD. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam merumuskan kebijakan. Sebagai contoh, pelatihan tentang analisis kebijakan publik dan komunikasi politik dapat sangat bermanfaat.
2. Penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. DPRD dapat mengadakan forum-forum diskusi atau konsultasi publik yang melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang pada gilirannya dapat menjadi masukan berharga bagi anggota dewan. Misalnya, mengadakan lokakarya atau seminar yang melibatkan berbagai elemen

masyarakat dapat membantu menciptakan dialog yang konstruktif antara DPRD dan konstituen.

3. Penguatan tim ahli dan staf pendukung DPRD juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Memastikan bahwa tim ini memiliki kompetensi yang sesuai akan sangat berpengaruh pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. DPRD dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan akses kepada tenaga ahli yang berkualitas.
4. DPRD perlu memperhatikan aspek anggaran dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Dengan merencanakan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, DPRD dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan didukung oleh dana yang memadai. Pengelolaan anggaran yang efisien juga akan membantu dalam mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pendanaan yang tidak stabil.
5. Penting untuk menciptakan budaya politik yang sehat di dalam DPRD. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar anggota dewan. Dengan menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan terbuka, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui, yaitu;

1. Cakupan penelitian ini terbatas pada DPRD Kabupaten Kutai Barat, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk daerah lain.

Setiap daerah memiliki konteks dan dinamika politik yang berbeda, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak inisiatif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut di daerah lain diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersumber dari dokumen resmi dan wawancara dengan anggota DPRD. Meskipun metode ini memberikan informasi yang berharga, namun ada kemungkinan bahwa data tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Misalnya, terdapat kemungkinan bahwa anggota DPRD cenderung memberikan jawaban yang lebih positif mengenai kinerja mereka, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas hasil penelitian.
3. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai dampak dari kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD terhadap masyarakat. Meskipun telah diidentifikasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan hak inisiatif, analisis lebih lanjut mengenai efek kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat akan sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang efektivitas DPRD.